



# ACCESS Tahap II

## Pendekatan ACCESS

[www.access-indo.or.id](http://www.access-indo.or.id)  
**ACCESS**

**IDSS**  
a world where aid is no longer needed  
An **arecon** company

## **Menciptakan Ruang, Menyediakan kesempatan**

*Tata pemerintahan yang baik mungkin merupakan faktor yang paling penting didalam menghapus kemiskinan dan mendorong pengembangan.. (Kofi Annan)*

### **Pendahuluan**

Tulisan ini menyajikan tentang pendekatan ACCESS Tahap II untuk mempromosikan tata pemerintahan demokratis yang lebih baik dengan cara bekerja dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan interaksi dinamis dengan pemerintah lokal. Tulisan ini menjelaskan pemikiran konseptual yang menjelaskan strategi ACCESS Tahap II, dampak yang ingin dilihat ACCESS ditingkat penerima manfaat dan hasilnya, yakni perubahan didalam perilaku (tindakan dan interaksi) dari organisasi mitranya, serta bagaimana ACCESS Tahap II akan melakukannya dan dengan siap ACCESS Tahap II akan bekerja untuk mencapai perubahan ini.

### **Pendekatan Konseptual**

ACCESS Tahap II berdasar pada pemahaman bahwa tata pemerintahan mewakili sebuah sistem yang kompleks dimana interaksi dengan sebuah lingkungan eksternal. Sistem ini menentukan bagaimana realitas dipahami dan bertindak berdasar pada dan pada akhirnya bagaimana dampak tata pemerintahan pada seluruh anggota masyarakat.

Sistem tata pemerintahan cukup rumit dikarenakan melibatkan berbagai faktor: pemerintahan di berbagai tingkat, dewan perwakilan rakyat; warga masyarakat dengan berbagai tingkat pengaruh dan kekuasaan; sistem peraturan; budaya pembuatan keputusan dan distribusi manfaat (baik formal maupun non formal); berbagai jenis kepemimpinan; tingkat partisipasi dan kemampuan dan pengetahuan perorangan.

Rancangan ACCESS Tahap II mengakui kerumitan sistem tata pemerintahan dan perlu mengadopsi strategi untuk mencoba mempengaruhi sistem agar lebih demokratis cara pelaksanaannya. Adopsi dari pendekatan soft sistem untuk ACCESS Tahap II mencerminkan pemahaman bahwa model output/input yang sederhana tidak cukup menjelaskan kenyataan dari sistem tata pemerintahan. Tetapi lebih baik ACCESS Tahap II terfokus pada sebuah jaringan kegiatan yang saling berkait yang dirancang untuk memicu perubahan dengan cara melibatkan aktor-aktor penting dari masyarakat sipil, pemerintah, dan hingga sebagian sector swasta.

Sistem pada intinya adalah mengenai orang dan organisasi mereka dan bagaimana mereka berhubungan antara satu dengan yang lain dan hingga lingkungan mereka. Oleh karena itu, ACCESS Tahap II aktor yang terpusat dan terfokus pada kegiatannya untuk memicu perubahan perilaku warga dan organisasi mereka.

### **Aktor ACCESS Tahap II**

ACCESS Tahap II bekerja dengan berbagai stakeholders, atau aktor didalam peran dan tingkat yang berbeda didalam Program. Aktor-aktor ini dikategorikan kedalam kelompok sebagai berikut:

### *Mitra Strategis*

Mitra Strategis merupakan organisasi dengan keahlian khusus yang dipilih berdasar rekam jejak mereka yang terbukti untuk membantu pelaksanaan Program. Mereka akan bekerja dengan ACCESS Tahap II dan Boundary Partners dengan cara menyediakan bantuan teknis, pelatihan dan mentoring kepada Boundary Partners untuk mengembangkan kapasitas, mengadakan penelitian dan baseline data dan menghasilkan bahan-bahan pembelajaran didalam membantu tujuan Program secara keseluruhan. Mereka juga akan membantu boundary partners ACCESS Tahap II didalam menilai jaringan penting dan para aktor yang beropareasi ditingkat propinsi dan nasional.

### *Boundary Partners*

Boundary Partners merupakan organisasi masyarakat sipil local yang berbagi nilai-nilai yang dipromosikan oleh Program dan dimana fokus utamanya pada merubah hubungan kekuasaan untuk menciptakan kesetaraan gender dan sosial yang besar didalam dampak pengembangan local. Berdasar pada hasil dari Rencana Interaksi secara Dinamis Warga Kabupaten, organisasi-organisasi tersebut akan bertindak secara aktif memecahkan isu-isu yang dihadapi oleh kabupaten dengan cara melibatkan individu-individu, organisasi warga dan jaringan mereka, bersama pemerintah local dan pihak-pihak lainnya yang tertarik didalam tata pemerintahan local yang demokratis. ACCESS Tahap II membantu organisasi ini dengan cara menciptakan ruang dan menyediakan kesempatan untuk bercermin, untuk belajar, untuk bertindak guna meningkatkan prestasi. ACCESS Tahap II bernegosiasi secara langsung dengan organisasi tersebut untuk menentukan jenis perilaku apa yang mereka ingin pengaruhi secara eksternal dan bagaimana mereka ingin merubahnya secara internal mempengaruhi perubahan ini. ACCESS Tahap II akan membantu secara langsung melalui pengembangan kapasitas keorganisasian dan individu dan dana hibah untuk kegiatan yang cocok dengan criteria Program sesuai dengan prinsip-prinsip panduannya.

### *Mitra Penerima Manfaat*

Mitra penerima manfaat merupakan pihak yang berinteraksi dengan Boundary Partners kita untuk menjalankan tata pemerintahan yang meningkat termasuk diantaranya warga masyarakat khususnya kelompok perempuan dan kaum miskin yang terpinggirkan, dan pemerintah lokal dan nasional.

### *Arahan Strategis ACCESS Tahap II*

Tiga arahan strategis mendasari seluruh kegiatan ACCESS Tahap II dan cara ACCESS Tahap II berinteraksi dengan berbagai aktor guna mempengaruhi sistem menuju tata pemerintahan yang lebih demokratis. Arahan strategis ini diantaranya:

**Pemberdayaan:** Didalam seluruh kegiatannya, ACCESS Tahap II menyediakan kesempatan, proses dan metodologi yang dirancang untuk mendorong Boundary Partners dan mitra penerima manfaat untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai penting dan relevannya isu-isu, menguatkan kesadaran kritis mereka, mengorganisir diri mereka sendiri untuk tindakan yang efektif dan mengembangkan rasa percaya diri mereka untuk mencari, mendapatkan dan secara bijak menggunakan sumber daya mereka (bahan-

bahan, manusia, alam dan peraturan) untuk kepentingan warga tetapi khususnya perempuan, kaum miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya.

**Interaksi dinamis:** ACCESS Tahap II mendorong interaksi diamis yang aktif dari warga yang diberdayakan (khususnya perempuan, kaum miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya), organisasi mereka dan Boundary Partners diantara satu dengan lainnya dan dengan pemerintah disemua tingkat. Melalui penciptaan ruang bagi pihak-pihak ini untuk bersama, mereka memiliki kesempatan untuk belajar, membangun hubungan yang berbasis kepercayaan dan bekerja bersama pada isu-isu mengenai pentingnya hubungan yang saling menguntungkan.

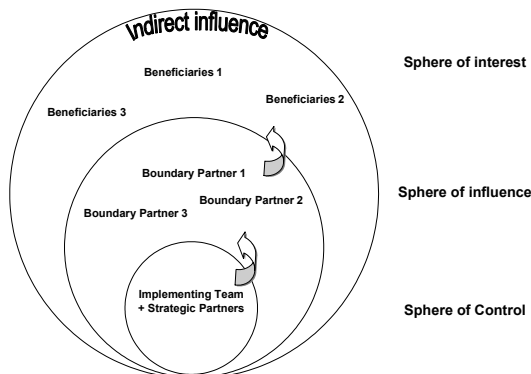
**Scaling up:** Melalui kegiatan dan interaksinya dengan Boundary Partners dan stakeholders lainnya, ACCESS Tahap II mendorong pendalaman dan perluasan aksi dan dampak. Boundary Partners didorong untuk berpikir mengenai kegiatan-kegiatan diseluruh tingkat didalam distrik, keterlibatan berbagai kelompok yang berbeda, replikasi dari perilaku yang baik, dan mempengaruhi lebih banyak orang yang bekerja dibidang yang sama melalui berbagi pembelajaran.

Pada akhirnya, pendekatan ACCESS Tahap II merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh nilai-nilai. ACCESS Tahap II mencakup sejumlah nilai yang konsisten dengan nilai-nilai tata pemerintahan yang demokratis. Hal itu termasuk diantaranya: penyertaan gender dan sosial; keberlanjutan; kerja sama dan kolaborasi; transparansi, akuntabilitas, partisipasi; dan pembelajaran yang berkelanjutan.. Nilai-nilai ini terletak di inti ACCESS Tahap II dan mempengaruhi keseluruhan pendekatan, kebijakan, strategi, sistem, prosedur operasi dan kegiatan Program. Boundary dan Strategic Partners secara langsung sadar akan nilai-nilai utama ini dan didorong untuk mendiskusikan, mengadopsi dan menghidupkan keduanya secara internal dan didalam interaksi mereka dengan pihak lain.

## Kerangka Kerja Outcome Mapping

ACCESS Tahap II menggunakan Outcome Mapping (OM) sebagai sebuah kerangka kerja terhadap pendekatannya. Sebuah kerangka kerja OM telah diadopsi karena mendukung pendekatan soft-sistem dengan cara membantu menjelaskan hubungan diantara aktor-aktor utama, dan berorientasi pembelajaran.. Outcome Mapping mengenal bahwa perubahan yang diinginkan ditingkat dampak (tingkat penerima manfaat) tidak disebabkan oleh sebuah intervensi tunggal atau serangkaian intervensi oleh Program saja, tetapi lebih oleh karena serangkaian sumber yang memungkinkan dari sejumlah perspektif yang berbeda.

Hubungan diantara para aktor dijelaskan dengan menggunakan bulatan-bulatan – bulatan



control, bulatan pengaruh dan bulatan kepentingan (lihat gambar 1). Didalam bulatan control ACCESS Tahap II bekerja bersama dengan Mitra Strategis untuk secara langsung mempengaruhi Boundary Partners Program. Dengan kata lain, tim pelaksanaan ACCESS Tahap II mengontrol masukan dan kegiatan dari Mitra Strategis. Sebaliknya,

Figure 1: Circles of influence (Source: Montague, 2001) and the sphere of interest, influence and control of the implementing team (source:ODI,2007)

dengan menyediakan bantuan secara langsung kepada Boundary Partners, ACCESS Tahap II mencoba untuk memiliki sebuah pengaruh langsung pada Boundary Partners dengan cara menciptakan ruang dan menyediakan kesempatan bagi mitra-mitra ini untuk bekerja dengan para penerima manfaat. Oleh karena itu, ACCESS Tahap II hanya dapat secara tidak langsung mempengaruhi perubahan ditingkat mitra penerima manfaat.

### **Wilayah Perubahan**

Program ACCESS Tahap II, melalui staf dan Mitra Strategisnya bekerja secara langsung dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang terpilih – Boundary Partners ACCESS Tahap II – ditiap kabupaten sasaran untuk membantu promosi tentang tata pemerintahan demokratis lokal dengan bekerja disejumlah wilayah utama dengan terfokus pada perempuan, kaum miskin dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan lainnya. Wilayah ini termasuk: mempromosikan partisipasi public didalam pembuatan keputusan, mendorong adanya transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi, membantu penyediaan layanan public yang berkualitas; mendorong keadilan sosial dan penegakan hukum.

#### ***Partisipasi Publik Didalam Pembuatan Keputusan***

Bersama Mitra Strategisnya, ACCESS Tahap II akan membantu Boundary Partners untuk mendorong institusionalisasi dari proses pembuatan keputusan yang partisipatif guna memastikan bahwa terdapat ruang untuk perempuan, kaum miskin, kaum muda dan kelompok-kelompok terpinggirkan atau tidak terwakili untuk berpartisipasi secara langsung didalam dan mempengaruhi pembuatan keputusan didalam organisasi mereka, didalam masyarakat dan desa mereka, dan didalam kabupaten mereka untuk meningkatkan akses terhadap dan control terhadap sumber daya dan pelayanan public. ACCESS Tahap II bertujuan untuk mempengaruhi kelompok-kelompok ini untuk memastikan mereka memiliki suara didalam proses dan pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

#### ***Pelayanan Publik yang Berkualitas***

Bersama Mitra Strategisnya, ACCESS Tahap II akan membantu Boundary Partners untuk mendorong penyediaan pelayanan public yang berkualitas yang memenuhi dan tanggap terhadap hak-hak dasar dari kaum miskin, perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Pelayanan ini akan mudah didapatkan, mudah digunakan, mudah untuk diakses. Boundary Partners perlu secara terus meningkatkan pelayanan yang mereka tawarkan dan membuatnya mudah untuk diakses oleh sebagian besar kelompok yang terpinggirkan..

#### ***Transparansi/Akuntabilitas dan Akses terhadap Informasi***

Bersama Mitra Strategisnya, ACCESS Tahap II akan membantu Boundary Partners untuk mendorong penganggaran dan penggunaan dana public yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa program dan pendanaan lebih bermanfaat bagi kaum miskin, perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Penggunaan yang lebih baik atas sumber daya public (baik didalam pemerintah dan didalam CSO) menjadikan pelayanan lebih terjangkau dan lebih efektif. Transparansi didalam proses pembuatan keputusan

meningkatkan akses dan control atas sumber daya oleh masyarakat secara keseluruhan dan khususnya kaum perempuan, kaum miskin dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang, biasanya, memiliki akses yang sangat kurang terhadap informasi mengenai program dan pelayanan yang lebih mempengaruhi mereka dibanding kelompok-kelompok utama. Boundary Partners ACCESS Tahap II dapat secara efektif meniru perilaku demokratis dengan mempraktekkan transparansi dan akuntabilitas terhadap para anggotanya, staf dan hingga ke masyarakat.

### **Keadilan Sosial/Penegakan Hukum**

Bersama Mitra Strategisnya, ACCESS Tahap II akan membantu Boundary Partners untuk mendorong pembangunan yang adil dan pengakuan terhadap, rasa hormat terhadap dan perlindungan hak-hak dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan guna memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut merasa aman dan nyaman didalam menyatakan harapan dan aspirasi mereka dan pemenuhan hak-hak mereka seperti yang dijamin didalam undang-undang. Boundary Partners ACCESS Tahap II, melalui artikulasi dari visi dan misi yang jelas dan melalui perilaku keorganisasian, dapat memastikan bahwa mereka menjalankan perilaku yang mempromosikan hak-hak dari para anggota, staf dan kelompok warga dimana mereka berinteraksi.

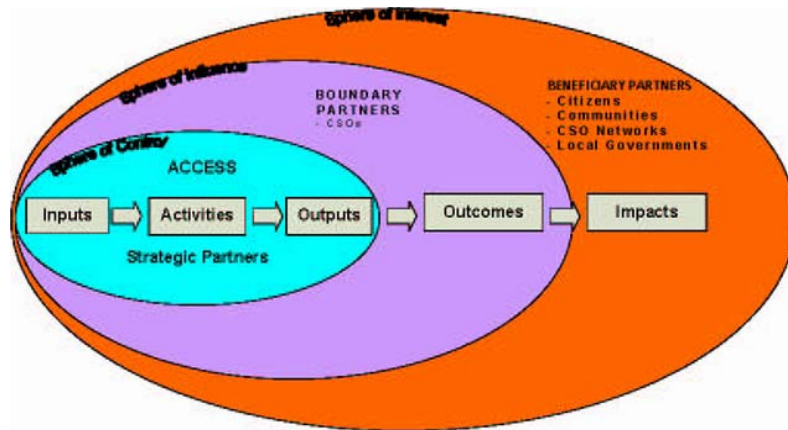
### **Outcomes**

ACCESS Tahap II bekerja dan berinteraksi dengan sejumlah kecil Boundary Partners (lihat Gambar 2) ditiap kabupaten sasaran yang memiliki visi yang sama mengenai tata pemerintahan lokal yang demokratis dan nilai-nilai bersama. Dengan bekerja bersama Boundary Partners ini, ACCESS Tahap II mengharapkan untuk menunjukkan bahwa Boundary Partners menggunakan pendekatan inklusif dan partisipatif yang didasari oleh nilai-nilai untuk menguatkan kapasitas dan rasa percaya diri warga untuk tata pemerintahan lokal yang demokratis. ACCESS Tahap II mengharapkan untuk menunjukkan bahwa Boundary Partners secara rutin saling bekerja sama antar satu dengan yang lain mengenai peningkatan tata pemerintahan demokratis dengan pemerintah ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. ACCESS Tahap II mengharapkan Boundary Partners secara rutin berinteraksi secara dinamis dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial dan penyampaian layanan yang berpihak pada kaum miskin. Dan pula, ACCESS Tahap II akan mengharapkan bahwa program-program Pemerintah dan program dari donor akan mempertimbangkan contoh-contoh hal yang telah dipelajari dan perilaku yang baik dari ACCESS Tahap II.

### **Dampak**

ACCESS Tahap II memiliki pernyataan utamanya "*Warga dan organisasinya diberdayakan untuk berinteraksi secara dinamis dengan pemerintah lokal mengenai peningkatan dampak pembangunan di 16 kabupaten di Indonesia Timur*". Dalam kenyataannya, pernyataan ini berarti bahwa ACCESS Tahap II menyumbang terhadap meningkatnya kualitas hidup kaum miskin, perempuan dan kelompok yang terpinggirkan melalui promosi penguatan warga dan organisasi mereka. Untuk melakukan hal ini diperlukan perubahan didalam tindakan, interaksi, relasi, proses, norma dimana dapat diringkas menjadi empat wilayah perubahan:

partisipasi public didalam pembuatan keputusan; pelayanan public yang berkualitas; transparansi; akuntabilitas dan akses terhadap informasi; dan keadilan sosial dan penegakan hukum. Melalui Boundary Partners (lihat Gambar 2), ACCESS Tahap II berusaha keras membantu warga dan organisasi mereka untuk mengembangkan cara baru dan lebih efektif didalam bertindak, berperilaku dan berhubungan antara satu dengan yang lain..



Gambar 2: Aktor Centred Program Logic using OM Framework

Pada tingkat penerima manfaat, ACCESS Tahap II melihat empat pengelompokan utama: Warga, Organisasi Warga (CSO), Jaringan CSO dan Pemerintah (di berbagai tingkat – desa kecamatan dan kabupaten). ACCESS Tahap II bermaksud bahwa kelompok-kelompok tersebut akan terpengaruh didalam hal dibawah ini:

### **Tingkat Warga**

Warga (khususnya kaum perempuan, kaum miskin, kaum muda dan kelompok yang terpinggirkan dan yang tidak terwakili) mengetahui situasi, hak dan aset-aset mereka dan memiliki kesadaran yang kritis mengenai situasi yang mereka hadapi dan berkeinginan untuk bertindak.

Mereka harus menjwai nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratik termasuk diantaranya: kemampuan untuk menyatakan pandangan mereka dan toleransi atas pandangan orang lain; sensitifitas terhadap penyertaan gender dan sosial; kerjasama; transparansi; akuntabilitas; dan partisipasi..

Mereka memiliki kapasitas untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, bertindak bersama untuk mendapatkan dan memobilisasi sumber daya yang mereka perlukan, dan berusaha keras membangun solidaritas dengan pihak lainnya.

### **Organisasi Warga:**

Organisasi warga diorientasikan terhadap pelayanan anggota dan konstituen mereka, memiliki visi masa depan yang jelas (bukan sekedar pelaksana proyek tetapi sebagai agen perubahan) dan memperjuangkan keadilan sosial. Mereka berorientasi demokratis secara internal (partisipasi, transparan dan akuntabel dan sensitive terhadap hak-hak semua, percaya terhadap dan memegang teguh hak-hak dasar seluruh warga tanpa melihat gender, ras, agama/kepercayaan atau status sosial) dan menunjukkan hal ini didalam kebijakan, prosedur dan program mereka.. Mereka menjadi sebuah tempat dimana warga, yang tahu dan sadar akan hak-hak mereka, dapat bertindak. Organisasi-

organisasi tersebut ingin dan mampu untuk menuntut hak-hak anggota atau konstituen mereka, bernegosiasi dan membela bersama pemerintah dan stakeholders lainnya dan dapat memobilisasi dan mengamankan sumber daya bagi organisasi dan anggota mereka. Organisasi ini memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk melayani para anggota dan konstituen mereka dan mengembangkan kapasitas mereka seperti yang dimandatkan. .

### ***Jaringan CSO:***

Jaringan CSO menjadi lebih visioner terhadap perubahan yang ingin mereka lihat. Para anggotanya menjalankan dan berbagi asset didalam kerja mereka untuk meningkatkan kehidupan orang dan merupakan kekuatan yang memiliki legitimasi untuk perubahan. Mereka memiliki divisi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab (ujung tombak, kerja lapangan dan sistem pendukung) dan memiliki kapasitas untuk menjalankan peran-peran ini secara efektif. Jaringan diorientasikan pada pelayanan kepentingan para anggota organisasi.

### ***Pemerintah di berbagai Tingkatan:***

Pemerintah diberbagai tingkatan cenderung untuk lebih tanggap dan akuntabel terhadap asosiasi warga yang terorganisir, terartikulasi, dan memiliki keahlian tentang warga yang menuntut hak-hak kewargaan mereka dengan cara-cara damai dan demokratis. Pemerintah telah merubah penampilannya dari 'yang dilayani' menjadi 'yang melayani' terhadap warga. Memang lebih visioner didalam pendekatannya dan memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan sungguh-sungguh dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi norma perilaku. Pemerintah (diberbagai tingkatan) bertindak untuk memastikan partisipasi dari kaum miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan didalam proses pembuatan keputusan dan memastikan pelayanan public yang bermutu tinggi mencapai hingga ke kelompok-kelompok ini.

Pemerintah desa telah merubah hubungan mereka dengan pemerintah kabupaten dan melihat diri mereka sendiri sebagai memiliki kekuatan untuk berubah, sementara pemerintah kabupaten melihat diri mereka sendiri sebagai memainkan peran yang bersifat mendukung didalam mendorong perubahan untuk keuntungan seluruh warga masyarakat, khususnya kaum miskin, perempuan dan kelompok yang terpinggirkan.